

**PERSEPSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UPT VI BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**MENA MERI SELLY SITEPU
NIM: 151801002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**PERSEPSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UPT VI BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**MENA MERI SELLY SITEPU
NIM: 151801002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Persepsi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

N a m a : Mena Meri Selly Sitepu

N P M : 151801002

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdul Kadir, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Prof. Dr. H. Wario, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2017

N a m a : Mena Meri Selly Sitepu

N P M : 151801002



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Muazzul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 30 Mei 2017

Yang menyatakan,



Mena Meri Selly Sitepu
Mena Meri Selly Sitepu

A B S T R A K

PERSEPSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UPT VI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

N a m a : Mena Meri Selly Sitepu
N I M : 151801002
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Dalam upaya meningkatkan kemandirian dan pembangunan diri, maka pemerintah pusat menetapkan salah satu penerimaan bagi daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat menjadi PBB. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung diserahkan kepada wajib pajak dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif dengan objek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan yang menentukan terutang pajak atau tidaknya. Perumusan masalah penelitian ini adalah apakah Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di UPT VI BPPRD Kota Medan yang berjumlah 93.514 Wajib Pajak. Dimana sampel yang diambil pada penelitian ini adalah *random sampling* yang berjumlah 100 orang responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan kuesioner. Data diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, Selanjutnya dilakukan uji analisa data dengan menggunakan analisis regresi sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Masyarakat yang diukur dengan Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPT VI Dinas Pendapatan Kota Medan baik secara parsial maupun secara simultan. Kemampuan Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak menjelaskan Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah 41.6% sedangkan sisanya sebesar 58.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Persepsi, Pengetahuan, Penghasilan, Wajib Pajak, Keberhasilan Penerimaan PBB

ABSTRACT

PERCEPTION OF COMPULSORY TAX COMPULSION IN PAYING EARTH AND BUILDING TAX ON SUCCESS TAX ACCEPTANCE AND BUILDING IN UPT VI VI TAX MANAGER AGENCY AND REGIONAL DEVELOPMENT OF MEDAN CITY

Name : Mena Meri Selly Sitepu
NPM : 151801002
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Supervisor II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

In an effort to improve self-reliance and self-development, the central government stipulates one of the revenue for the regions is the Land and Building Tax which is shortened to the United Nations Organization. Land and Building Tax is a direct tax whose collection is directly submitted to the taxpayer and when it is due at the beginning of the following year. The United Nations Organization is an objective tax with the object of taxes in the form of land and or buildings that determine tax payable or not. The formulation of this research problem is whether the perception of Compliance Taxpayers in paying Land and Building Tax Affects Against the Successful Acceptance of Land and Building Tax at UPT VI Medan City Tax and Retribution Management Agency. The population of this study is all taxpayers in UPT VI BPPRD Medan City amounting 93,514 Taxpayers. Where samples taken in this research is random sampling which amounts to 100 respondents. Data were collected using observations and questionnaires. The data were tested by using validity and reliability test. Furthermore, data analysis was tested by using simple regression analysis, t test, and coefficient of determination. The results of this study indicate that the Public Awareness as measured by the perception of Taxpayers, Taxpayer Knowledge and Income Taxpayer Affects Against the Successful Acceptance of Land and Building Tax at UPT VI BPPRD Medan City either partially or simultaneously. Ability of Taxpayer Perception, Taxpayer Knowledge and Taxpayer Income explain the success of Land and Building Tax Acceptance at UPT VI Medan City Tax and Retribution Agency is 41.6% while the rest of 58.6% is explained by other variables not included in this research.

Keywords : Perception, Knowledge, Income, Taxpayer, Acceptance Success of The United Nations.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang mana sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Tesis ini berjudul “Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa meskipun penulis telah berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Tesis yang terbaik, namun dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka Tesis ini masih jauh dari yang diharapkan, Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan tesis yang akan penulis selesaikan.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis. Untuk itu, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Warjio, MA. yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menimba ilmu di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Prof. Dr. Badaruddin, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan arahan, masukan yang sangat berarti bagi

penulis, sehingga tersusunlah tesis ini dengan tepat waktu. Semoga apa yang telah diperbuat kepada penulis hanya Allah SWT yang membalasnya. Amin.

5. Dr. Abdul Kadir, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan saran – saran kepada penulis sehingga penulis dapat dengan baik menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak.
6. Kepada Suami Jumino SE, yang telah banyak memberikan suport dan dukungan baik secara moril dan materi untuk saya menyelesaikan S2 MAP ini.
7. Kepada Kedua Orang Tua Penulis, yang telah banyak memberikan dukungan baik dukungan material maupun dukungan moril serta seluruh fasilitas yang disediakan untuk penulis. Semoga Tesis ini dapat menjadi setitik air yang dapat menghilangkan sedikit kedahagaan Ayahanda dan Bunda.
8. Kepada kawan – kawan satu kelas dan satu angkatan di Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang namanya tidak dapat disebut satu per satu. Semoga kita dapat mengikat talisilaturahmi yang lebih baik di hari – hari mendatang.
9. Terakhir kepada semua pihak yang nama – namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di kesempatan kali ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Medan,30 Mei 2017
P e n u l i s,

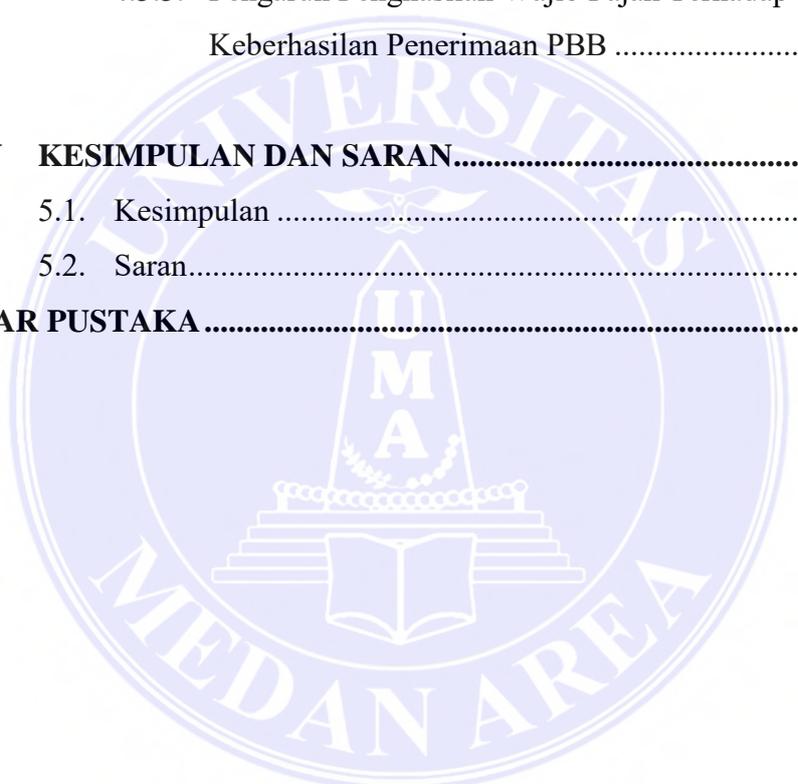
MENA MERI SELLY SITEPU

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Penelitian	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Hasil Penelitian	8
1.6. Kerangka Penelitian	9
1.7. Hipotesis Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pengertian Pelayanan Publik.....	12
2.2. Prinsip Pelayanan Publik	14
2.3. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak	16
2.4. Fungsi Pajak	18
2.5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WP	25
2.7.1. Persepsi Wajib Pajak.....	25
2.7.2. Pengetahuan Wajib Pajak.....	25
2.7.3. Penghasilan Wajib Pajak	26
2.8. Keberhasilan Penerimaan Pajak.....	27

2.9. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Tempat/Waktu Penelitian.....	33
3.1.1. Tempat Penelitian.....	33
3.1.2. Waktu Penelitian	33
3.2. Bentuk Penelitian	33
3.3. Populasi dan Sampel	34
3.3.1. Populasi.....	34
3.3.2. Sampel.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	36
3.6. Teknik Analisis Data.....	37
3.6.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	37
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.3. Regresi Linear Berganda.....	41
3.6.4. Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan	43
4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan K. Medan	45
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.2. Hasil Penelitian	51
4.2.1. Deskripsi Data Responden	51
4.2.2. Deskripsi Variabel Persepsi Wajib Pajak.....	52
4.2.3. Deskripsi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak.....	59
4.2.4. Deskripsi Variabel Penghasilan Wajib Pajak.....	68
4.2.5. Deskripsi Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB .	72
4.2.6. Pengujian Kualitas Data	76
4.2.7. Uji Asumsi Klasik	79

4.2.8. Model Analisis Data.....	81
4.3. Pembahasan.....	87
4.3.1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	87
4.3.2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB	90
4.3.3. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

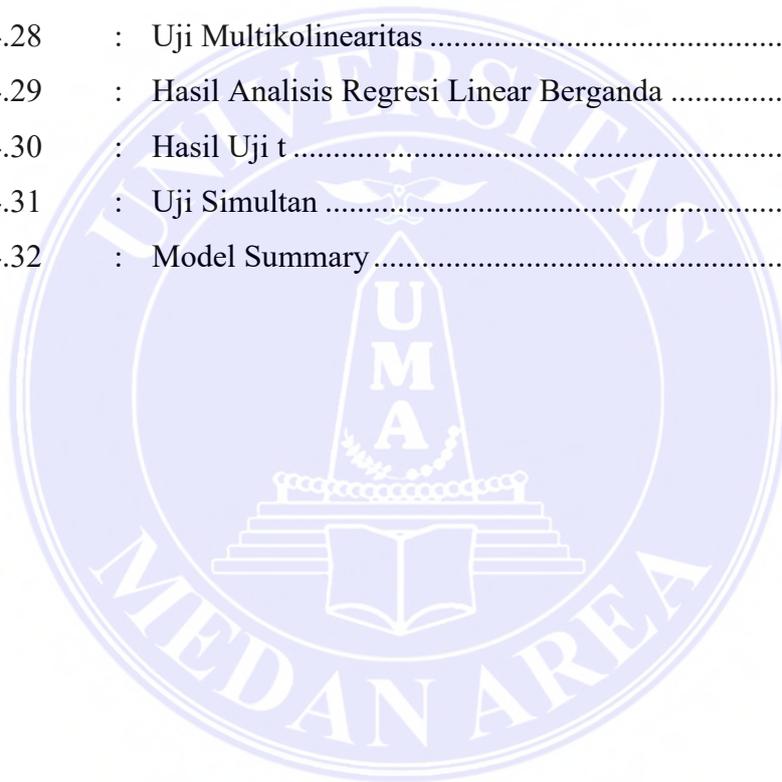


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012	3
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	33
Tabel 3.2 : Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 4.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2 : Identitas Responden Menurut Usia	52
Tabel 4.3 : Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Indikator Persepsi Tentang Pelayanan Fiskus	53
Tabel 4.4 : Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Indikator Persepsi Tentang Pelayanan Fiskus	54
Tabel 4.5 : Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Persepsi Tentang Sanksi Administrasi Perpajakan	55
Tabel 4.6 : Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Persepsi Tentang Sanksi Administrasi Perpajakan	56
Tabel 4.7 : Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Persepsi Tentang Pemungutan Pajak.....	57
Tabel 4.8 : Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Persepsi Tentang Pemungutan Pajak.....	58
Tabel 4.9 : Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Kepemilikan NPWP	60
Tabel 4.10 : Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Kepemilikan NPWP	61

Tabel 4.11	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai WP.....	62
Tabel 4.12	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai WP.....	63
Tabel 4.13	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Sanksi Perpajakan.....	64
Tabel 4.14	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Sanksi Perpajakan.....	65
Tabel 4.15	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Sosialisasi Dinas Pendapatan Kota Medan	66
Tabel 4.16	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Sosialisasi Dinas Pendapatan Kota Medan	67
Tabel 4.17	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Besarnya Penghasilan.....	68
Tabel 4.18	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Besarnya Penghasilan.....	69
Tabel 4.19	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Besarnya Pungutan PBB	70
Tabel 4.20	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Besarnya Pungutan PBB	71
Tabel 4.21	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Pemungutan	73
Tabel 4.22	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang	

	Pemungutan	74
Tabel 4.23	: Jawaban Responden atas Kuesioner Pertama Tentang Penyetoran	75
Tabel 4.24	: Jawaban Responden atas Kuesioner Kedua Tentang Penyetoran	76
Tabel 4.25	: Hasil Uji Validitas	77
Tabel 4.26	: Hasil Uji Reliabilitas	78
Tabel 4.27	: Uji Normalitas	79
Tabel 4.28	: Uji Multikolinearitas	80
Tabel 4.29	: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	82
Tabel 4.30	: Hasil Uji t	84
Tabel 4.31	: Uji Simultan	85
Tabel 4.32	: Model Summary	86



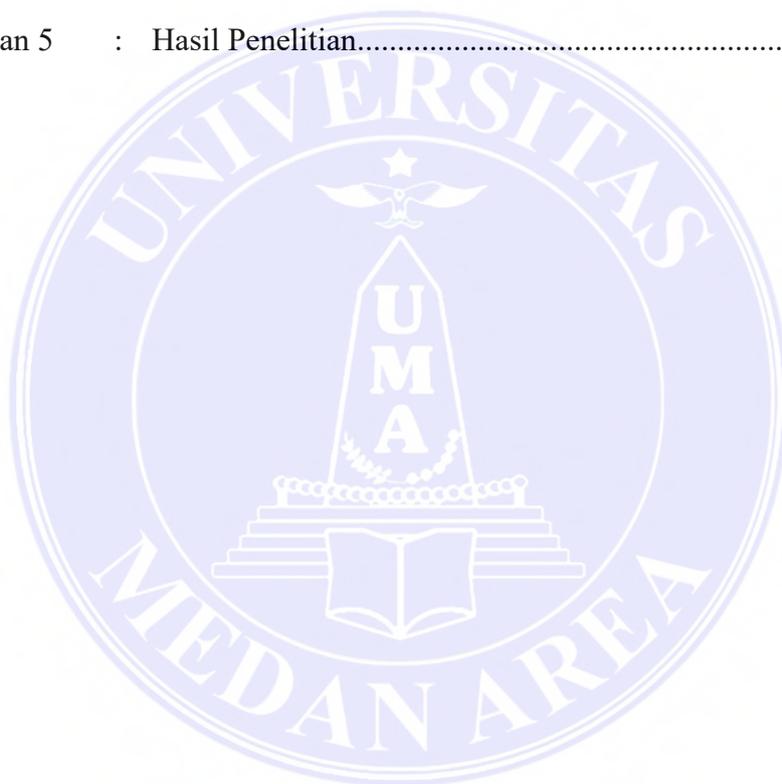
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Kerangka Penelitian	10
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan	46
Gambar 4.2 : Uji Heteroskedastisitas	81



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner.....	101
Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden.....	104
Lampiran 3 : Tabel r Product Moment.....	116
Lampiran 4 : Uji Validitas dan Reliabilitas	117
Lampiran 5 : Hasil Penelitian.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung terpenting dalam upaya percepatan pembangunan. Minimnya, realisasi PAD secara otomatis akan menghambat laju percepatan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Realisasi PAD ini masih sangat minim terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Pajak bumi dan bangunan merupakan satu primadona pajak daerah

yang memberikan kontribusi cukup tinggi di antara seluruh komponen pendapatan asli daerah Kota Medan, untuk itu ketersediaan sumber daya perpajakan yang memiliki kompetensi penilaian pajak bumi dan bangunan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan kemampuan daerah didalam menilai pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan Kota Medan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012. Penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan sejak menjadi pajak daerah sesuai UU No.28 tahun 2009.

Penentuan penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dicapai didalam satu tahun pajak dan keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dilihat apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, sanksi tegas yang diberikan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak memberatkan, dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagai pemoderasi pendapatan masyarakat apakah dapat memperlemah atau memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Salah salah *front* terdepan dalam melakukan pemungutan pajak terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Medan. Unit Pelaksana Teknis ini ada 7 UPT yang membawahi 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah itu sendiri telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi BPPRD beserta struktur organisasi melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 1 Tahun 2010, sehingga penyuluhan sendiri berada di bawah sub bidang bagi hasil pajak yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan memberikan sosialisasi kepada petugas pajak dan wajib pajak itu sendiri yang berhubungan dengan PBB. Mereka adalah pihak yang paling diharapkan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada negara.

Dalam hal ini UPT VI sebagai salah satu UPT yang bertanggung jawab untuk 3 Kecamatan Johor, Selayang dan Tuntungan , serta membawahi ... kelurahan bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah lingkungannya.

Namun hal yang menarik pada pembahasan ini adalah dari sejak dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak daerah pada tahun 2010 sesuai dengan Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK/07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010

Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan. Pemerintah Kota Medan belum mampu untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti pada tahun 2013 Pemerintah Kota Medan menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan sekitar Rp 383 Miliar. Namun penerimaan pajak masih dirasakan masih kurang maksimal, dimana capaian realisasinya hanya sebesar 61,18%. Data sehubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada Pemerintah Kota Medan adalah seperti berikut ini:

Tabel 1.1 : Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan Tahun Anggaran 2012 s/d 2016

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Realisasi Penerimaan (%)
2012	353.346.171.770	275.138.356.001	77,87
2013	383.000.000.000	234.325.866.564	61,18
2014	365.000.000.000	289.000.081.973	79,18
2015	376.000.000.000	302.176.917.525	80,37
2016	386.540.861.523	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang tidak mencapai target penerimaan yang diinginkan Pemerintah Kota Medan. Pada saat awal pengalihan penuh Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2012 penerimaan realisasi anggaran adalah sebesar 77,87% hal ini sebenarnya merupakan awal yang sangat baik. Namun pada tahun 2013 realisasi penerimaan

anggaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar 61,18% tentu hal ini kurang baik bagi Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi trend peningkatan penerimaan menjadi 79,18% pada tahun 2014 dan 80,37% pada tahun 2015, namun demikian Pemerintah Kota Medan tidak mencapai target yang telah ditetapkannya. Sedangkan untuk tahun berjalan, data target realisasi adalah sebesar Rp. 386.540.861.523.

Data – data tersebut sangat jelas menunjukkan rendahnya masyarakat Kota Medan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah. Hal ini yang menjadikan target capaian Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan tidak mencapai target. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat membayar pajak, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang masih rendah (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern yang menganut sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya sendiri (Harahap, 2004). Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Suardika dalam Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan bahwa masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar

hukum penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. Menurut Jatmiko (2006) beberapa faktor yang dominan dalam membentuk kepatuhan Wajib Pajak agar patuh adalah:

1. Persepsi wajib pajak
2. Tingkat pengetahuan
3. Kondisi keuangan wajib pajak

Persepsi wajib pajak tentunya akan berkaitan dengan pandangan wajib pajak tentang pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, penggunaan uang setoran pajak dan tentang pelayanan publik yang akan didapatkan oleh wajib pajak ketika telah membayar kewajiban pajaknya. Hal ini tentu akan berdampak pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak juga terpengaruh.

Jika dilihat dari tingkat pengetahuan wajib pajak, sangat jelas bahwa pengetahuan wajib pajak dalam mendaftar, menghitung sesuai dengan peraturan perundang – undangan akan mendorong serta pengetahuan tentang manfaat dari membayar kewajiban perpajakannya akan meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak terhutangnya.

Kemudian penghasilan juga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika penghasilan wajib pajak rendah, tentunya akan sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk membayar kewajibannya dan sebaliknya ketika tingkat penghasilannya tinggi akan menimbulkan kesadarannya dalam membayar pajak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Muliari dan Setiawan (2010) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noormahayu, et al (2015) menunjukkan bahwa *tax morale, tax knowledge and tax compliance* berpengaruh signifikan terhadap *taxpayer awareness*. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sriwidharmanely (2013) menunjukkan bahwa *understanding of tax accounting, the service quality of tax officers, the awareness of taxpayer and transparency taxation* berpengaruh positif signifikan terhadap *obedience of corporate taxpayers*.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT VI Dinas Pendapatan Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Persepsi Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Persepsi Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tentang variabel – variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan.
2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, saran dan gambaran tentang variabel – variabel kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan tentang variabel – variabel kesadaran masyarakat

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan.

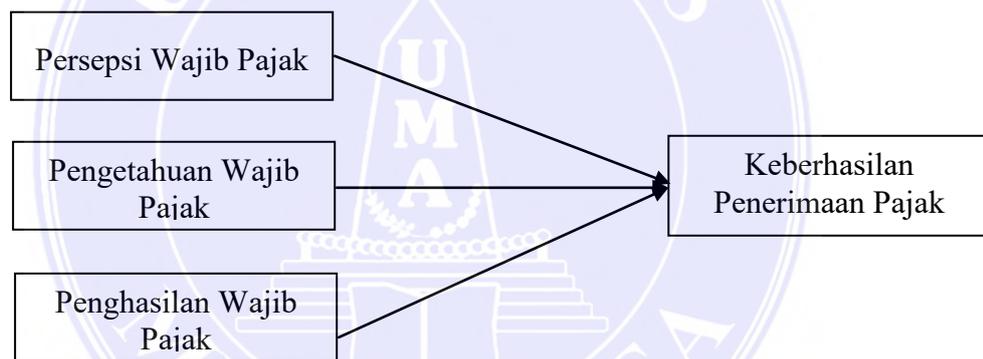
1.5. Kerangka Penelitian

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Persepsi akan berkaitan dengan banyak hal, baik tentang pelayanan, penggunaan dana pajak maupun tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak. Tentunya persepsi yang ada pada masyarakat akan berkaitan dengan tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Ketika persepsi Wajib Pajak baik atau positif, maka keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan akan semakin baik. Dan sebaliknya ketika persepsi Wajib Pajak kurang baik, atau buruk dan atau positif, maka keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan juga akan menjadi kurang baik.

Kemudian pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya penghasilan wajib pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Ketika masyarakat memiliki tingkat penghasilan wajib pajak tinggi, maka hal ini akan menimbulkan kesadaran wajib pajak yang tentunya memiliki dampak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penjelasan – penjelasan tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar kerangka penelitian berikut ini:



Gambar 1.1 : Kerangka Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan kerangka penelitian ini maka dapat ditetapkan yang menjadi hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Persepsi Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pelayanan Publik

Dinamika pelaksanaan pembangunan dan perkembangan teknologi, merubah peranan dan fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah tidak hanya berdasarkan kepada fungsi – fungsi klasik semata, tetapi dituntut peranannya sebagai unsur inisiatif dalam usaha pembaharu dan pendorong pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan menjadi pelopor atau agen pembangunan (Kadir, 2016). Dengan demikian, maka aparatur Pemerintah ditempatkan untuk menjalankan fungsi di samping sebagai abdi negara, juga sebagai abdi masyarakat (*public servant*). Dalam konteks ini, kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi aparatur Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintah maupun pembangunan.

Penyelenggaraan dimaksud meliputi kegiatan mengatur, membina dan mendorong maupun dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan masyarakat terutama partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut maka dijabarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh unit – unit pelaksana (Istianto dalam Kadir, 2016).

Menurut Kotler dalam Kadir (2016), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan. Dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan menurut Kurniawan dalam Kadir (2016) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sedangkan istilah publik berasal dari Bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai (Badudu dan Zain dalam Kadir, 2016). Menurut Inu, dkk dalam Kadir (2016) mengartikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Sedangkan menurut Kurniawan dalam Kadir (2016), pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan telah ditetapkan. Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang – undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

2.2. Prinsip Pelayanan Publik

Sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, maka prinsip – prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut (Istianto dalam Kadir, 2016):

1. Kesederhanaan

Mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Prinsip kesederhanaan ini untuk:

- a. Makin sedikitnya simpul, meja petugas dalam prosedur birokrasi pelaksanaan pelayanan umum
- b. Memudahkan masyarakat dalam mengurus, mendapatkan pelayanan, antara lain dengan cara mengurangi kesempatan terjadinya kontak langsung antara petugas dan masyarakat.
- c. Memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis/prosedur panjang, sehingga akan memperlancar dalam proses serta menciptakan tatalaksana pelayanan yang baik.

2. Kejelasan dan Kepastian

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

- a. Prosedur tata cara pelayanan
- b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif
- c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan
- d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran
- e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan

3. Keamanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini dengan memperhatikan hal – hal berikut ini:

- a. Keamanan, mutu produk pelaksanaan pelayanan umum meliputi:
 - 1) Produk pelayanan administrasi
 - 2) Produk pelayanan barang
 - 3) Produk pelayanan jasa
- b. Nyaman, kondisi dan mutu dalam proses pelaksanaan pelayanan hendaknya diciptakan:
 - 1) Kondisi tempat/ruang pelayanan yang dapat memberikan rasa nyaman
 - 2) Terpenuhi secara lancar bagi kepentingan urusan pelayanan serat

- 3) Mutu produk pelayanan yang diberikan pada masyarakat tersebut dapat memenuhi ukuran yang standar

4. Keterbukaan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur, persyaratan, satuan kerja penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses pelayanan diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Oleh sebab itu hal yang perlu diupayakan dalam prinsip ini adalah:

- a. Penginformasian instrumen pelayanan secara terbuka. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan:
 - 1) Bagan air prosedur dan persyaratan
 - 2) Setiap satuan kerja/loket pelayanan dan nama pejabat/petugas penanggungjawab perlu dibuat
 - 3) Tarif dan rincian biaya yang harus dibayar oleh pemohon pelayanan, diinformasikan secara terbuka
- b. Menyediakan fasilitas media informasi
- c. Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat.

5. Efisien

Prinsip ini mengandung arti:

- a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal – hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

- b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal ini proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan, memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan:

- a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar
- c. Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Keadilan yang merata

Prinsip ini mengandung arti pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan hal – hal berikut ini:

- a. Cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan hendaknya meliputi semua kelas sosial yang merata
- b. Tidak membedakan perlakuan pemberian pelayanan, misalnya
 - 1) Biaya atau persyaratan yang dikenakan pada masyarakat
 - 2) Urutan tindakan pemberian pelayanan harus sesuai dengan nomor urut pendaftaran

- 3) Kecepatan kelancaran waktu pelaksanaan pelayanan bagi golongan masyarakat tertentu.

8. Ketepatan waktu

Prinsip ini mengandung arti pelaksana pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dengan memperhatikan hal – hal berikut ini:

- a. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan
- b. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung, misalnya melalui:
 - 1) Pencatatan atas setiap kegiatan yang dilakukan bawahan pada buku monitoring, blanko, fomulir, dll
 - 2) Forum pertemuan, rapat sebagai sarana untuk menyusun perencanaan, memberikan informasi perkembangan kegiatan, laporan/evaluasi pelaksanaan pekerjaan.

2.3. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negara terhadap UU sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak diambil berdasarkan penguasa yang mempunyai norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo (2009:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Kesit (2003) menyebutkan pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas Negara karena Undang – Undang, dan atas pembayaran tersebut, pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Ilyas dan Burton (2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pada penjelasan definisi pajak tersebut, maka dapat ditarik unsur pajak itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pajak diambil berdasarkan UU. Aturan ini berdasarkan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak bersifat memaksa untuk keperluan dan berlangsungnya kehidupan bernegara.
2. Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung melainkan bertahap demi kepentingan bersama.
3. Pengambilan pajak untuk membiaya pembangunan infrastruktur pemerintahan dan demi berlangsungnya kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk pemerintah tetapi dikembalikan kepada rakyat.
4. Pembayaran pajak merupakan hal yang wajib dan mutlak serta harus dilakukan dan jika tidak membayar atau membohongi pemerintah akan dikenakan sanksi yang besar.
5. Pajak juga berfungsi untuk membiaya pekerjaan di lapangan, bukan hanya untuk anggaran belanja negara tetapi untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi dari segala sektor.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia, sedangkan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Perseroan Komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yaitu bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai satu kebutuhan penting yaitu dana yang didapat dari, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran dalam kehidupan pemerintahan termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Ilyas dan Burton (2007) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran) mempunyai tugas yaitu memberikan sumber pendapatan negara pajak yang mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh sebab itu untuk menjalankan kewajiban rutin negara dan melaksanakan pembangunan dan bernegara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang besar ini tentu saja dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Zaman ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti pembayaran gaji pegawai, membeli barang seperti peralatan, pemeliharaan, dan lain lain. Untuk pembiayaan pembangunan yang begitu besar, uang dicairkan dari tabungan pemerintah melewati penerimaan internal bangsa ini dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan

pemerintah yang sangat besar ini ini dari tahun ke tahun semakin membesar sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin membesar oleh sebab itu yang paling utama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi *Regulerend* (Regulasi) yaitu pemerintah bisa mengatur secara leluasa pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Dengan kebebasan yang mempunyai suatu fungsi mengatur pajak diperbolehkan digunakan sebagai alat untuk mencapai hasil yang jelas. Seperti dalam rangka membantu investor dalam penanaman modal maupun di negeri sendiri maupun di luar negeri dengan memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pembayaran pajak untuk menarik investor asing. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri maka pemerintah mempunyai aturan untuk pemerintah berhak menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemasalahan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahan.

4. Fungsi Distribusi pendapatan Pajak yang telah dipungut oleh negara tidak serta merta hanya demi kepentingan sedikit orang, tetapi digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk pembangunan untuk itu dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Suandy (2002) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan *subyek* (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/ Bangunan yang memiliki , dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengertian yang terkandung dalam Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut: “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk dalam dana perimbangan. Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan azas

pembantuan karena dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% untuk daerah.

1. Objek pajak

Berdasarkan Pasal 2 (UU No 12 Tahun 1994) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi / tanah diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Letak;
- b. Peruntukkan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan;
- b. Rekayasa;
- c. Letak; dan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain.

2. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Dengan demikian tandapembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah Kepatuhan WP yaitu bagaimana sikap dari seorang WP yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Dalam kaitannya dengan WP, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan menurut Mahon (2001) dalam Sulistiyono (2012) adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Peningkatan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat koprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai (Sulistiyono, 2012). Target pajak dapat diwujudkan bila tercapai kesadaran dan kepatuhan masyarakat WP untuk dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Menurut Rajif (2012), banyak dari WP yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini membuat tingkat kepatuhan membayar pajak

menjadi terpengaruh. Susanto (2013) mengemukakan bahwa penyebab utama WP melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif pada masyarakat terhadap instansi perpajakan berikut oknumoknumnya. Persepsi tersebut juga dibentuk oleh sederetan kasus pajak yang membelit negeri ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang sedang mewabah di Indonesia. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan WP. Penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Pengetahuan teknis perpajakan yang memadai, memegang peran penting agar WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Bila setiap WP mengetahui dengan jelas tentang kriteria WP dan perhitungannya, maka WP akan memiliki kesadaran dan patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Rahmawaty, dkk (2011), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), serta Edo, dkk (2013) yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sikap fiskus, di mana dengan adanya sikap yang baik dari petugas pajak, peraturan perpajakan yang jelas, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada WP agar taat

pajak, akan membuat WP memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Adapun sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar WP mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan WP akan ditentukan berdasarkan persepsi WP tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku WP untuk taat pajak.

2.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah Dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu:

2.7.1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Indikator yang digunakan untuk variabel Persepsi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi tentang pelayanan fiskus
2. Persepsi tentang sanksi administrasi perpajakan

3. Persepsi tentang pemungutan pajak.

2.7.2. Pengetahuan Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) memberikan hasil bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Indikator yang digunakan untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP
2. Hak dan Kewajiban Sebagai WP
3. Sanksi Perpajakan
4. Sosialisasi Dinas Pendapatan Kota Medan

2.7.3. Penghasilan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan wajib pajak yang tercermin dari tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama satu bulan. Penghasilan per bulan yang tinggi

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada Wajib Pajak yang mempunyai Penghasilan yang rendah. Wajib Pajak dengan penghasilan yang rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Indikator yang digunakan untuk variabel Penghasilan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Besarnya penghasilan per bulan
2. Besarnya Pungutan PBB Per tahun

2.8. Keberhasilan Penerimaan Pajak

Keberhasilan penerimaan pajak adalah peningkatan sikap pro aktif wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Sikap pro aktif wajib pajak merupakan salah satu elemen sifat dan sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Komponen konatif (tindakan) dari sikap (Azwar, 2000) merupakan aspek kecenderungan bertindak bereaksi terhadap sesuatu dengan cara – cara tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki sikap. Dengan demikian, keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini diasumsikan sebagai kecenderungan untuk bersikap positif oleh wajib pajak atau bereaksi positif wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara tertentu yang dimiliki wajib pajak.

Indikator yang digunakan untuk variabel Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan
2. Penyetoran

2.9. Penelitian Terdahulu

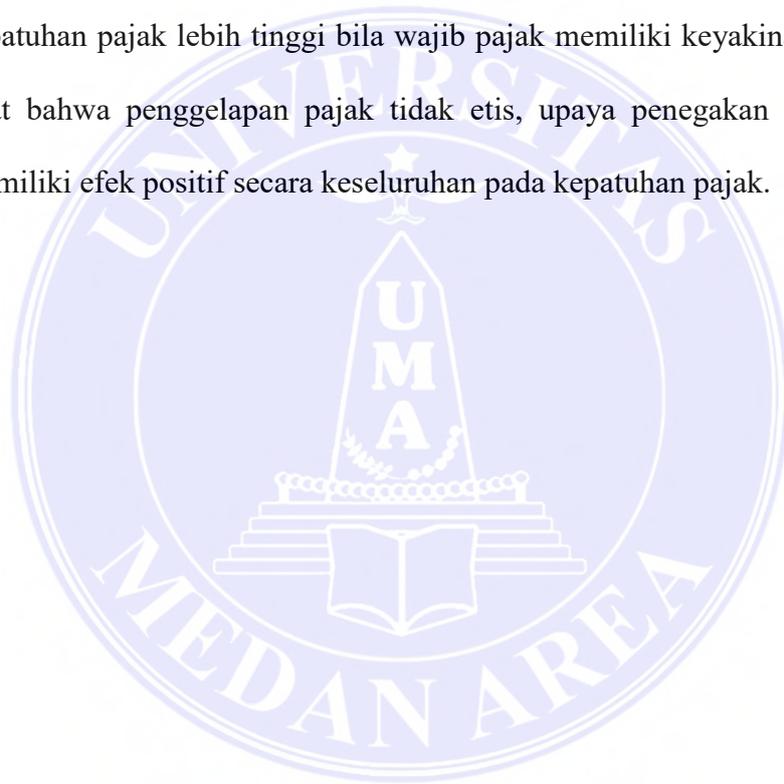
3. Sehubungan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sriwidharmanely, Darman Usman, dan Emilda Sulastri (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa Understanding of tax accounting, service quality of tax officers, awareness of taxpayers and transparency in taxation berpengaruh positif dan signifikan terhadap toward obedience of corporate taxpayers di Kota Bengkulu.
4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Ermy Norhayati Syamsiah (2013) yang menyatakan hasil penelitian bahwa secara parsial Kepatuhan perpajakan wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan pada wajib orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan tax avoidance yang melekat wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Banjarmasin.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri (2013) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Kepatuhan wajib pajak dan persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Selain itu, tingkat efektivitas pajak daerah sudah menunjukkan hasil yang efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Jonathan M. Farrar (2011) menunjukkan bahwa dari empat dimensi keadilan pajak, hanya ekuitas horizontal secara signifikan dan positif terkait dengan kepatuhan pajak. Analisis persamaan struktural mengungkapkan hubungan positif antara ekuitas horizontal dan keadilan prosedural, dan tinjauan literatur mengungkapkan bahwa dampak hasil *favourability* pajak asosiasi kepatuhan keadilan pajak. Ada juga efek utama yang signifikan dari kedua ekuitas horizontal dan hasil *favourability* pada kepatuhan pajak.
7. Penelitian yang dilakukan Peggy D. Jimenez (2013) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan dalam pemerintahan dan penurunan keadilan yang dirasakan dari sistem pajak menyebabkan penurunan niat untuk mematuhi undang-undang pajak. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah memahami tindakan mereka dapat mengambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Harris, Thomas Donald (1989) menunjukkan bahwa jenis persepsi individu pengetahuan pajak yang terkena 'dari kewajaran hukum pajak. hasil tahap dua menyarankan bahwa peningkatan individu persepsi keadilan hukum meningkat pembayar pajak compliance. Sedangkan jenis pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan pada tingkat pembayar pajak kepatuhan, jenis pengetahuan pajak

mempengaruhi tingkat persepsi keadilan dan, dengan demikian, memiliki efek tidak langsung pada pembayar pajak kepatuhan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Ho dan Brossa Wong (2008) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan etika bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi pembayar pajak dengan tingkat yang lebih rendah dari perkembangan moral. Kedua, sebagai tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi bila wajib pajak memiliki keyakinan moral yang kuat bahwa penggelapan pajak tidak etis, upaya penegakan kuat mungkin memiliki efek positif secara keseluruhan pada kepatuhan pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di UPT VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota jalan Suka Indah STM Medan. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di wilayah UPT VI sebagai penerima PBB terendah tiap tahunnya.

3.1.2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan February 2017. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nopember 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Riset																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Penyusunan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

3.2. Bentuk Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Umar,2003). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak yang diukur menggunakan Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah Keberhasilan Penerimaan Pajak.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan satuan analisis yang didalamnya terkandung informasi yang ingin diketahui. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Rata – rata jumlah Wajib Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan di UPT VI adalah 93.514 Wajib Pajak.

3.3.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik probabilitas dengan cara *random sampling* (Metode Sampel Acak Sederhana), yaitu dengan metode pemilihan sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Dimana:

n = banyaknya sampel

N = banyaknya populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, yaitu 0,1 atau 10%

Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat ditetapkan besarnya sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{93.514}{93.514(0,10)^2 + 1} = 99,96 \text{ dibulatkan } 100 \text{ responden}$$

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket

Yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan pada responden yang dijadikan sampel. Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Jawaban pada kuesioner menggunakan metode skala likert yang dapat dilihat seperti di bawah ini:

Jawaban A (Sangat Setuju) Bobot = 5

Jawaban B (Setuju) Bobot = 4

Jawaban C (Kurang Setuju) Bobot = 3

Jawaban D (Tidak Setuju) Bobot = 2

Jawaban E (Sangat Tidak Setuju) Bobot = 1

2. Studi Dokumentasi

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki oleh VI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah dipublikasikan.

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Variabel adalah penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Variabel penelitian ini seperti yang tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Persepsi Wajib Pajak (X_1)	Persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (<i>fairness</i>) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	1. Persepsi tentang pelayanan fiskus. 2. Persepsi tentang sanksi administrasi perpajakan 3. Persepsi tentang pemungutan pajak	Interval
Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)	Pemahaman tentang administrasi perpajakan dimulai dari kepemilikan NPWP sampai dengan tarif pajak	1. Kepemilikan NPWP 2. Hak dan Kewajiban Sebagai WP 3. Sanksi Perpajakan 4. Sosialisasi Dinas Pendapatan Kota Medan	Interval
Penghasilan (X_3)	Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang	1. Besarnya penghasilan per bulan	Interval

	tercermin dari penghasilan per bulan	2. Besarnya pungutan PBB per tahun	
Keberhasilan Penerimaan PBB (Y)	Peningkatan sikap pro aktif wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan	1. Pemungutan 2. Penyetoran	Interval

Sumber : Dari berbagai sumber, 2016

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan instrumen yang reliable adalah jika instrumen digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2005).

Instrumen penelitian yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian atau tidak. Valid artinya data yang diperoleh melalui kuesioner dapat menjawab tujuan penelitian. Reliabel artinya data yang diperoleh melalui kuesioner hasilnya konsisten bila digunakan untuk penelitian lain.

1. Uji Validitas

Menurut Situmorang dan Lufti (2001) validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu pengukuran instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan tujuan dan harapan

peneliti. Tujuan dari dilakukannya uji validitas adalah untuk mengukur ketepatan suatu instrument penelitian atau dengan kata lain bahwa uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item pertanyaan yang digunakan dapat menguji suatu model dalam penelitian ini. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Correlated item – total correlation* atau disebut dengan r_{hitung} . Menurut Sunyoto (2009) menyatakan Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid, dan jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Situmorang dan Lufti (2011), Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian ini dilakukan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrument handal, konsisten, stabil dan dependibilitas, sehingga apabila digunakan berulang-ulang maka akan menghasilkan yang sama. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1, reliabilitas dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih besar atau sama dengan 0,60. Untuk pengujian ini dilakukan dengan teknik Cronbach Alpha.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian valid, dengan data yang digunakan secara teori tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2013). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak *valid* untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi normalitas data, peneliti menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, kriteria data dikatakan berdistribusi normal jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali,

2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance variance* di atas 0,1 atau VIF di bawah 10 (Ghozali,2013). Apabila *tolerance variance* di bawah 0,1 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali,2013). Uji *glejser* dilakukan dengan meregresi nilai *absolute residual* terhadap variable independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka model tersebut bebas dari heterokedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat heterokedastisitas.

3.6.3. Regresi Linear Berganda

Pengolahan data dilakukan dengan SPSS V 16 Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : Keberhasilan Penerimaan PBB

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi variabel X_1

b_2 : Koefisien regresi variabel X_2

b_3 : Koefisien regresi variabel X_3

X_1 : Persepsi Wajib Pajak

X_2 : Pengetahuan Wajib Pajak

X_3 : Penghasilan Wajib Pajak

e : Error

3.6.4. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu:

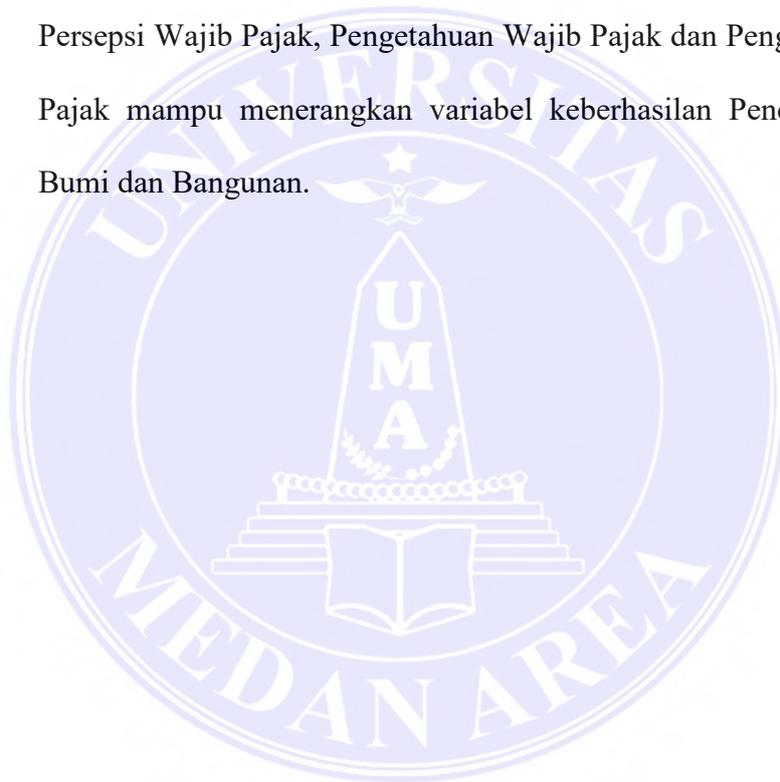
- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, tolak H_0 terima H_a pada taraf signifikan 95%
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, terima H_0 tolak H_a pada taraf signifikan 95%.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara serempak (simultan). Adapun kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , sebagai berikut:

- a. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikan 95%, maka hipotesis alternative diterima.
 - b. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 95% maka hipotesis alternative ditolak.
3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak mampu menerangkan variabel keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Arikunto, Suharsimi., 2010., *Prosedur penelitian (Pendekatan Praktis)*., Jakarta, PT. Rineka Cipta

Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting .2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. *Tax & Accounting Review*, Vol.1,No.1,2013

Devano, Sony dan Rahayu (2006), *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Kencana, Jakarta

Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard (2007), *Hukum Pajak*, Penerbit Salempat Empat, Jakarta

Kadir, Abdul (2016), *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, CV. Dharma Persada Dharmasraya

Kesit, Bambang Prakoso (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit UII Press, Yogyakarta

Mardiasmo (2011), *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta

Moloeng, Lexy J., (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Mohamad Rajif. 2011. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha 88 UKM di Daerah Cirebon*. Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Gunadarma.

Nurmantu, Safri (2003), *Pengantar Perpajakan, Edisi Kedua*, Penerbit Granit, Jakarta

Ni Luh Supadmi. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Resmi, Siti (2003), *Perpajakan Teori dan Kasus & Teori dan Kasus Buku 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Suandy, Erly (2002), *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono., 2005., *Statistik untuk penelitian*, Bandung, CV Alfabeta

Waluyo (2009), *Akuntansi Pajak, Edisi Kedua Cetakan Pertama*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Wahid Sulaiman, (2004) *Analisis Regresi Menggunakan SPSS: Contoh Kasus & Pemecahannya*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta

Yulia Arum. 2013. *Pengaruh Self Assessment System dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)*. Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011), “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”, Skripsi Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Christianto Danang Prihartono (2013), “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Fitri, Kurniawaty, (2011), “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun II, No. 4, November 2011

Ilham Koentarto (2011), “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)”, *Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial “Sociocientia”*, Volume 3 Nomor 2, Juni 2011, Hal. 243 – 258

- Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani (2008), “Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalorejo Kota Pekalongan”, Jurnal
- Kusumawati (2006), “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System”, Tesis Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang
- Noormala, Siti Sheikh Obid (2008), “Voluntary Compliance: tax education preventive. International Cenferece on Business and Aconomy 6 – 8 November 2008 Constanta Romania”, International Islamic University Malaysia
- Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri (2013), “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan”, Jurnal Tax & Accounting Review, Voll 3 No. 2, Hal. 1 – 18
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1, Hal. 126 – 142
- Putrawan, Anak Agung Gde dan Sudirman, I Wayan (2014), “Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar”., Jurnal Fakultas Ekonomi Udayana, Bali
- Sriwidharmanely, Darman Usman, dan Emilda Sulastrri (2013), “The Effect of Understanding of Tax Accounting, Service Quality of Tax Officers, Awarness of Tacpayers and Transparency in Taxation Toward Obedience of Corporate Taxpayers in Bengkulu City”, Prosiding Programme The 14th MIICEMA Conference, Bogor
- Sri Ernawati dan Ermy Norhayati Syamsiah, “Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banjarmasin)”, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 14 No. 1 hal. 71 – 76
- Tarigan, Kharisma Wanta, (2013), “Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado”, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 Juni 2013, Hal. 282 – 291

Undang – Undang dan Peraturan Lainnya

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Perpajakan

Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan



Lampiran 1: Kuesioner

ANGKET PENELITIAN

Judul : PERSEPSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UPT VI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

No :

Dimohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini dengan hati yang ikhlas dan sesuai dengan kenyataan yang dialami dalam bekerja. Angket ini hanya untuk penelitian dan kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu dijamin oleh peneliti. Terima kasih atas segala bantuannya.

Identitas Responden

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Wanita

Usia :

Petunjuk Pengisian :

1. Berikan jawaban pada pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, dengan cara memberikan tanda (\surd) pada kolom yang tersedia.
2. Setiap pernyataan hanya dibutuhkan 1 (satu) jawaban.
3. Bobot nilai yang digunakan dalam penilaian :
 - Jawaban (a) : bobot nilai = 5
 - Jawaban (b) : bobot nilai = 4
 - Jawaban (c) : bobot nilai = 3
 - Jawaban (d) : bobot nilai = 2
 - Jawaban (e) : bobot nilai = 1

VARIABEL PERSEPSI WAJIB PAJAK (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Petugas yang membagikan Surat Tagihan Pajak sangat ramah					
2	Petugas yang membagikan Surat Tagihan Pajak cepat merespon semua pertanyaan Anda					
3	Anda sangat yakin jika Anda tidak membayar tagihan, maka Anda tidak mendapatkan sanksi dari Petugas Pajak					
4	Sanksi perpajakan tidak pernah dijalankan oleh petugas pajak					
5	Pemungutan pajak selalu diingatkan dan diinformasikan oleh petugas pajak ke rumah-rumah penduduk					
6	Anda sering terlambat menerima Surat Tagihan Pemungutan pajak bumi dan bangunan					

VARIABEL PENGETAHUAN WAJIB PAJAK(X₂)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Anda memiliki NPWP karena sangat membutuhkannya					
2	Untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Anda tidak membutuhkan NPWP					
3	Mempertanyakan dasar perhitungan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Hak Anda					
4	Membayar sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Petugas Pajak merupakan salah satu kewajiban utama Anda sebagai Wajib Pajak					
5	Ketika Anda tidak membayar pajak sesuai tagihan, maka Anda akan mendapatkan sanksi pajak yang tegas					
6	Tidak membayar pajak secara terus menerus, maka Anda akan didakwa melakukan tindakan pidana oleh petugas pajak					
7	Petugas Pajak selalu melakukan sosialisasi					

	tentang Hak dan Kewajiban Anda sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan					
8	Sosialisasi yang dilakukan petugas pajak bumi dan bangunan dilakukan langsung dari rumah ke rumah					

VARIABEL PENGHASILAN (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Anda membayar pajak karena memiliki penghasilan yang besar					
2	Penghasilan yang besar mendorong Anda untuk patuh pada setiap aturan perpajakan di Indonesia					
3	Anda enggan membayar pajak karena jumlah yang dipungut terlalu besar					
4	Anda merasakan besarnya pungutan pajak Bumi dan Bangunan Anda tidak wajar					

VARIABEL KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pungutan pajak bumi dan bangunan sangat gencar dilakukan oleh petugas pajak					
2	Sebelum dilakukan pungutan, petugas melakukan sosialisasi terlebih dahulu					
3	Anda memiliki Kepatuhan untuk melakukan penyetoran tagihan pajak bumi dan bangunan					
4	Setoran pajak yang Anda lakukan sangat dipermudah oleh petugas pajak					

Lampiran 2: Tabulasi Jawaban Responden

No. Resp	Tabulasi Persepsi Wajib Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	4	5	5	5	5	29
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	5	5	5	5	29
5	3	3	4	3	3	4	20
6	5	5	5	5	4	5	29
7	3	3	2	2	3	2	15
8	5	4	4	4	4	4	25
9	3	3	3	3	4	3	19
10	4	4	4	4	5	4	25
11	3	3	4	4	3	4	21
12	4	5	4	5	4	5	27
13	5	4	4	4	4	5	26
14	5	5	4	5	5	4	28
15	4	3	4	4	4	4	23
16	4	4	4	5	5	5	27
17	5	5	5	5	4	5	29
18	5	4	4	3	3	3	22
19	3	3	3	3	3	4	19
20	4	4	4	4	4	3	23
21	4	4	4	3	3	4	22
22	5	3	5	4	4	4	25
23	4	4	4	4	4	5	25
24	4	5	5	5	5	5	29
25	3	4	3	3	3	4	20
26	4	4	4	5	5	4	26
27	5	5	4	5	5	5	29
28	5	4	5	5	5	4	28
29	4	3	3	3	3	3	19
30	5	4	5	5	5	4	28
31	4	3	4	3	3	3	20
32	4	5	5	4	4	3	25
33	3	3	2	3	3	4	18
34	5	5	4	4	3	4	25
35	3	3	3	4	4	5	22

36	4	4	4	4	5	3	24
37	5	5	4	5	5	5	29
38	4	3	3	4	4	5	23
39	4	4	5	5	4	5	27
40	5	5	5	5	5	3	28
41	4	4	5	4	3	5	25
42	3	4	4	4	5	3	23
43	5	4	4	4	4	4	25
44	3	3	4	4	4	3	21
45	4	4	5	5	5	4	27
46	4	4	3	3	4	4	22
47	5	4	5	4	4	3	25
48	4	4	4	4	4	5	25
49	5	4	4	4	4	3	24
50	5	5	5	4	3	4	26
51	3	3	3	4	4	4	21
52	4	4	4	4	5	5	26
53	5	5	4	5	5	4	28
54	3	3	4	4	4	5	23
55	3	3	4	4	4	5	23
56	4	4	4	5	5	3	25
57	3	4	5	3	3	4	22
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	4	4	4	4	3	24
60	4	4	3	3	3	3	20
61	4	4	4	3	4	4	23
62	3	3	5	4	3	4	22
63	5	5	4	4	5	4	27
64	3	3	3	3	4	4	20
65	4	4	4	4	5	4	25
66	5	5	4	5	5	4	28
67	4	4	3	4	4	5	24
68	4	5	4	5	5	5	28
69	3	5	4	4	3	4	23
70	5	5	5	4	4	3	26
71	5	4	2	3	3	4	21
72	5	3	5	4	4	5	26
73	3	3	4	4	3	4	21
74	5	4	5	5	5	3	27
75	5	5	5	4	4	4	27
76	4	3	3	3	4	4	21

77	4	3	4	3	4	3	21
78	3	4	4	4	4	4	23
79	4	5	4	4	4	4	25
80	5	5	4	5	5	5	29
81	3	4	4	4	4	5	24
82	4	4	4	4	5	4	25
83	4	4	4	4	3	4	23
84	5	5	4	5	4	3	26
85	4	3	3	3	4	5	22
86	3	3	4	4	5	4	23
87	2	2	3	3	5	5	20
88	4	4	5	4	4	3	24
89	3	3	3	3	5	4	21
90	5	5	5	4	4	4	27
91	4	4	3	3	3	5	22
92	4	4	3	4	5	3	23
93	2	3	2	3	4	4	18
94	5	5	5	4	4	4	27
95	4	4	4	3	5	5	25
96	5	5	5	5	5	5	30
97	3	3	3	3	2	4	18
98	5	4	4	4	4	5	26
99	4	4	4	4	5	4	25
100	5	5	4	5	5	5	29

No. Resp	Tabulasi Pengetahuan WP								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	5	4	5	5	5	5	39
2	4	5	5	4	5	5	4	5	37
3	5	5	4	4	5	5	4	2	34
5	5	5	5	5	5	5	4	4	38
5	4	4	2	3	4	4	4	3	28
6	5	5	4	5	5	4	4	5	37
7	3	4	3	3	2	3	2	2	22
8	4	5	5	5	4	3	5	4	35
9	3	3	3	3	3	3	3	4	25
10	3	4	4	4	5	3	4	5	32
11	3	2	3	3	4	3	4	3	25
12	5	5	4	5	4	4	5	5	37
13	2	5	5	5	5	4	5	4	35
14	5	4	5	5	4	5	5	5	38
15	5	5	5	4	5	5	4	5	38
16	5	5	5	4	4	5	4	5	37
17	3	4	4	4	5	5	5	5	35
18	2	5	5	3	2	4	5	3	29
19	3	2	2	5	3	4	4	3	26
20	5	5	5	4	5	5	5	5	39
21	5	4	5	4	2	4	2	3	29
22	5	5	5	3	5	3	5	3	34
23	4	4	5	4	5	4	4	4	34
24	2	5	4	4	5	4	5	4	33
25	3	3	2	4	3	4	3	3	25
26	4	5	3	4	4	4	4	5	33
27	3	4	5	4	4	4	4	3	31
28	4	5	5	4	5	5	3	5	36
29	5	5	4	4	5	5	4	2	34
30	2	2	5	4	3	4	4	2	26
31	4	4	2	3	4	4	4	3	28
32	4	4	4	5	4	5	4	4	34
33	3	4	3	3	5	3	4	2	27
34	4	5	5	5	4	3	5	4	35
35	4	4	4	4	5	3	3	5	32
36	3	2	4	4	5	3	4	5	30
37	5	4	5	5	4	5	5	5	38

38	5	5	3	3	3	3	3	3	28
39	4	4	4	3	3	3	4	4	29
40	2	2	2	4	4	3	4	4	25
41	5	5	2	4	5	4	4	5	34
42	5	5	2	4	5	5	5	5	36
43	4	3	5	5	5	4	5	5	36
44	4	4	4	3	5	3	5	3	31
45	5	5	4	5	5	4	4	5	37
46	3	3	4	3	4	4	3	3	27
47	4	2	5	3	5	5	5	3	32
48	5	5	2	4	2	5	4	5	32
49	5	5	5	5	5	4	4	5	38
50	5	5	5	5	5	3	5	5	38
51	4	4	4	4	5	3	3	5	32
52	3	2	4	4	5	3	4	5	30
53	5	4	5	5	4	5	5	5	38
54	5	5	3	3	3	3	3	3	28
55	4	4	3	3	4	4	3	4	29
56	2	2	2	4	4	4	4	4	26
57	5	5	2	4	5	4	4	5	34
58	5	5	4	5	5	5	5	5	39
59	4	3	5	5	5	3	5	5	35
60	4	4	2	3	4	4	4	4	29
61	5	5	4	5	5	4	4	4	36
62	3	4	3	3	5	3	4	5	30
63	4	5	5	5	4	3	5	5	36
64	4	4	4	4	5	3	4	5	33
65	3	2	4	4	5	3	4	3	28
66	5	4	5	5	4	5	5	5	38
67	5	5	3	3	3	3	4	5	31
68	4	4	3	3	4	4	3	3	28
69	3	2	2	5	3	4	4	3	26
70	5	5	5	4	5	5	5	5	39
71	5	4	5	4	2	5	4	3	32
72	5	5	5	3	5	3	5	3	34
73	3	4	5	4	4	4	5	3	32
74	4	5	5	4	5	5	3	5	36
75	5	5	4	4	5	5	4	2	34
76	2	2	5	4	3	4	5	2	27
77	4	4	2	3	4	4	4	3	28
78	5	5	4	5	5	4	4	5	37

79	3	3	3	3	3	3	2	2	22
80	5	5	5	5	5	5	4	4	38
81	5	5	5	3	5	4	5	5	37
82	4	4	2	3	4	4	5	5	31
83	5	5	4	5	5	4	5	4	37
84	5	5	5	5	5	4	5	5	39
85	5	4	5	4	2	5	5	4	34
86	5	5	4	3	4	4	5	5	35
87	3	2	3	2	3	2	3	3	21
88	5	4	5	5	4	5	4	5	37
89	5	5	5	5	5	5	5	5	40
90	4	3	5	5	4	5	4	4	34
91	3	4	3	3	4	4	4	5	30
92	5	5	5	5	5	5	5	5	40
93	3	2	3	2	3	2	5	5	25
94	5	4	5	5	3	5	5	5	37
95	4	4	5	5	4	5	2	3	32
96	4	5	5	4	4	3	4	5	34
97	4	5	4	4	5	4	5	4	35
98	4	3	5	5	4	5	5	4	35
99	5	4	4	4	5	5	4	4	35
100	5	5	5	5	4	5	5	5	39

No. Resp.	Tabulasi Tentang Penghasilan WP				Total
	1	2	3	4	
1	5	4	4	4	17
2	5	4	4	3	16
3	5	5	5	4	19
4	4	5	4	4	17
5	3	3	4	4	14
6	5	5	5	4	19
7	3	4	3	3	13
8	5	5	5	5	20
9	4	4	3	3	14
10	5	4	3	4	16
11	4	4	3	5	16
12	4	5	4	5	18
13	5	4	5	5	19
14	3	4	4	4	15
15	4	4	5	5	18
16	5	4	5	4	18
17	4	4	3	3	14
18	3	4	3	3	13
19	3	5	4	4	16
20	4	5	5	5	19
21	4	5	4	4	17
22	4	5	3	5	17
23	4	5	4	4	17
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	3	15
26	5	5	5	2	17
27	5	5	4	5	19
28	5	4	4	3	16
29	4	4	3	4	15
30	4	5	4	4	17
31	5	5	5	5	20
32	4	5	4	5	18
33	3	5	3	4	15
34	5	5	3	5	18
35	4	5	5	5	19

36	5	4	4	4	17
37	4	4	4	3	15
38	5	4	4	4	17
39	4	4	4	4	16
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	4	5	5	5	19
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	5	17
45	5	4	4	4	17
46	4	4	4	4	16
47	4	4	4	4	16
48	5	5	4	4	18
49	5	5	5	5	20
50	3	2	4	5	14
51	4	3	4	4	15
52	5	4	3	4	16
53	5	5	5	5	20
54	4	3	3	3	13
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	3	4	4	4	15
58	5	5	4	4	18
59	4	4	4	4	16
60	5	4	4	5	18
61	4	4	4	4	16
62	5	5	4	4	18
63	5	5	3	4	17
64	4	5	5	5	19
65	5	5	5	5	20
66	5	4	5	5	19
67	5	4	4	4	17
68	4	4	4	4	16
69	5	5	5	5	20
70	4	4	4	4	16
71	5	5	5	5	20
72	4	5	3	4	16
73	4	4	4	3	15
74	4	4	4	3	15
75	4	4	4	4	16
76	5	4	4	4	17

77	3	4	4	4	15
78	4	3	4	4	15
79	3	3	3	3	12
80	4	4	4	4	16
81	5	5	4	4	18
82	5	4	5	5	19
83	5	5	5	5	20
84	5	5	4	4	18
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	5	5	4	4	18
88	5	5	5	5	20
89	5	5	5	5	20
90	5	5	5	4	19
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16
94	5	4	4	4	17
95	4	5	4	4	17
96	4	4	4	4	16
97	5	4	3	5	17
98	4	3	3	3	13
99	5	4	3	4	16
100	4	4	4	5	17

No. Resp	Tabulasi Penerimaan PBB				Total
	1	2	3	4	
1	5	5	5	5	20
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	5	5	4	5	19
5	4	3	3	3	13
6	3	3	4	4	14
7	3	2	3	2	10
8	5	4	3	5	17
9	4	2	3	3	12
10	4	4	4	4	16
11	3	3	3	5	14
12	4	5	4	5	18
13	5	4	4	4	17
14	5	4	5	5	19
15	5	5	5	4	19
16	4	4	5	4	17
17	5	4	4	4	17
18	3	4	4	5	16
19	3	5	4	4	16
20	4	2	5	5	16
21	3	5	5	2	15
22	4	5	3	5	17
23	4	3	4	2	13
24	5	5	4	5	19
25	3	3	4	3	13
26	5	5	5	2	17
27	5	5	4	5	19
28	5	4	4	3	16
29	4	4	4	4	16
30	5	5	4	5	19
31	3	3	4	4	14
32	3	4	4	4	15
33	3	5	3	4	15
34	5	5	3	5	18
35	4	3	3	3	13

36	5	4	3	4	16
37	5	4	5	5	19
38	4	4	3	3	14
39	4	4	3	3	14
40	5	4	4	4	17
41	3	4	4	4	15
42	5	5	5	5	20
43	4	4	4	5	17
44	4	4	4	5	17
45	5	5	4	4	18
46	3	4	3	4	14
47	4	5	4	5	18
48	4	4	4	4	16
49	4	5	4	4	17
50	4	4	3	3	14
51	4	3	3	3	13
52	5	4	3	4	16
53	5	4	5	5	19
54	4	4	3	3	14
55	4	3	4	3	14
56	5	4	4	4	17
57	3	4	4	4	15
58	5	5	5	5	20
59	4	4	4	5	17
60	3	3	4	4	14
61	4	3	4	4	15
62	3	5	3	4	15
63	5	5	3	5	18
64	4	2	3	3	12
65	5	4	3	4	16
66	5	4	5	5	19
67	4	4	4	3	15
68	4	3	4	3	14
69	3	5	4	4	16
70	3	4	4	4	15
71	3	5	4	2	14
72	4	5	3	5	17
73	5	5	4	5	19
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	4	5	5	5	19

77	3	3	4	4	14
78	4	3	4	4	15
79	3	2	2	3	10
80	5	5	4	5	19
81	5	5	5	5	20
82	5	4	4	3	16
83	4	4	4	4	16
84	5	5	4	5	19
85	3	3	3	4	13
86	4	3	3	4	14
87	3	2	3	2	10
88	5	5	4	5	19
89	5	5	5	5	20
90	5	4	4	3	16
91	4	4	4	4	16
92	5	5	4	5	19
93	3	3	3	4	13
94	4	3	3	4	14
95	4	3	4	4	15
96	4	4	4	3	15
97	5	4	4	5	18
98	4	2	3	3	12
99	5	4	3	4	16
100	5	4	5	5	19

Lampiran 3: tabel r product moment

Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Lampiran 4: Uji Validitas dan Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.789	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Persepsi_WP1	20.2200	7.224	.588	.744
Persepsi_WP2	20.3400	7.297	.634	.733
Persepsi_WP3	20.3100	7.428	.575	.748
Persepsi_WP4	20.3100	6.822	.803	.692
Persepsi_WP5	20.2000	7.879	.471	.773
Persepsi_WP6	20.2200	8.961	.213	.828

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pengetahuan_WP1	28.7000	16.212	.557	.728
Pengetahuan_WP2	28.6800	16.139	.513	.736
Pengetahuan_WP3	28.7800	16.355	.446	.750
Pengetahuan_WP4	28.7700	17.108	.537	.735
Pengetahuan_WP5	28.5800	17.600	.397	.756
Pengetahuan_WP6	28.7700	17.633	.443	.749
Pengetahuan_WP7	28.6100	17.998	.412	.754
Pengetahuan_WP8	28.7100	16.572	.463	.746

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.686	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penghasilan_WP1	12.4900	2.192	.431	.644
Penghasilan_WP2	12.5000	2.152	.483	.611
Penghasilan_WP3	12.7500	2.068	.517	.588
Penghasilan_WP4	12.6600	2.126	.444	.637

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.706	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penerimaan_PBB1	11.8600	3.596	.480	.651
Penerimaan_PBB2	12.0200	3.050	.561	.597
Penerimaan_PBB3	12.1500	3.947	.424	.683
Penerimaan_PBB4	11.9700	3.181	.515	.630

Lampiran 5: Hasil Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80478925
Most Extreme Differences	Absolute	.034
	Positive	.031
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		.336
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

a. Test distribution is Normal.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.398	1.83277

a. Predictors: (Constant), Penghasilan_WP, Persepsi_WP, Pengetahuan_WP

b. Dependent Variable: Penerimaan_PBB

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229.531	3	76.510	22.777	.000 ^a
	Residual	322.469	96	3.359		
	Total	552.000	99			

a. Predictors: (Constant), Penghasilan_WP, Persepsi_WP, Pengetahuan_WP

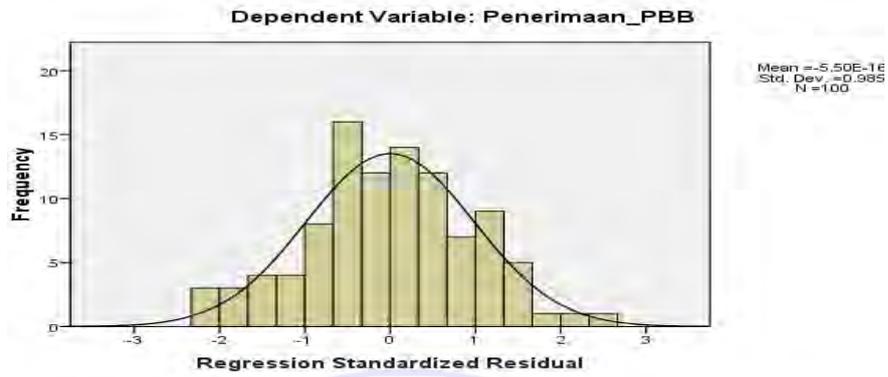
b. Dependent Variable: Penerimaan_PBB

Coefficients^a

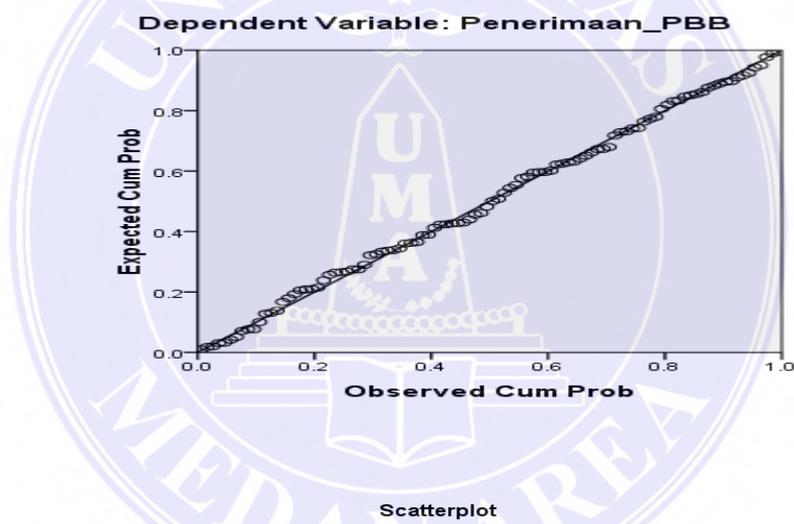
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.604	2.094		.289	.774		
	Persepsi_WP	.180	.066	.247	2.723	.008	.739	1.353
	Pengetahuan_WP	.201	.048	.395	4.198	.000	.687	1.455
	Penghasilan_WP	.262	.104	.206	2.528	.013	.917	1.090

a. Dependent Variable: Penerimaan_PBB

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dependent Variable: Penerimaan_PBB

